



Media: BERNAS

Hari: Senin

Tanggal: 20 Februari 2017

Halaman: 1

Kubu Imam
Tuntut
Pemilihan Ulang

JOGJA, BERNAS -- Tim Pemenangan paslon Imam Priyono-Achmad Fadli masih menuntut penyelenggara pemilu untuk membuka kotak suara yang tidak sah. Bila tidak dilakukan, mereka menuntut digelar pemilihan ulang.

"Kalau penyelenggara pemilu sampai akhir perhitungan manual tidak mengindahkan tuntutan itu (pembukaan kotak suara), kami menuntut dikukurnya pemungutan suara ulang. Itu bertujuan bukan untuk mencari menang semata, tapi bagian edukasi politik kepada publik terkait menjaga integritas proses demokrasi di kota Yogyakarta," kata Danang Rudyatmoko, Ketua Tim Pemenangan paslon Imam-Fadli, di Kantor DPP PDI Perjuangan Yogyakarta, Minggu (19/2).

Danang menjelaskan, bila tidak dilakukan juga oleh KPU Kota Yogyakarta, mereka akan melaporkan ke KPU DIY.

Danang menegaskan, bila dibutuhkan, kubunya juga akan melakukan tuntutan hukum ke DKPP maupun MK.

Kubu Imam-Fadli bertekad akan mengawal terus suara rakyat Yogyakarta yang telah memberikan pilihan.

► ke hal 7

Kubu Imam

Menurut Danang, ada banyak kejanggalan, baik sebelum, pada saat pemungutan suara, hingga rekapitulasi di PPK. "Kejanggalan yang lain adalah banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena berbagai hal," kata Danang.

Saat rekapitulasi suara, lanjut Danang, ada sekitar 14 ribu surat suara yang tidak sah. Kondisi ini dianggapnya merugikan pemilih yang telah berpartisipasi karena suara sah dihitung tidak sah. Ia menginginkan transparansi dan integritas dari penyelenggara.

"Ada intimidasi dialami saksi, termasuk ketika menggunakan batik saat bertugas tidak diperbolehkan. Ini apa masalahnya? Belum lagi masalah aparat sipil negara yang tidak netral. Harus di proses hukum oknum PNS-nya," kata Danang.

Tim Pendampingan DPP PDI Perjuangan, Tanto Kusuma, mengatakan Pilwakot Yogyakarta mendapatkan perhatian langsung dari DPP PDI Perjuangan. "DPP PDI Perjuangan serius memberi

kan perhatian proses pilwali Yogyakarta," katanya.

Hadri juga tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan yang ikut menelaah masalah Pilwakot Yogyakarta. "Kita ingin pastikan penyelenggaraan pilwali bisa berjalan sesuai amanat konstitusi," ujarnya.

Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi DPP PDI Perjuangan, Aris Surya, menambahkan pihaknya telah melakukan identifikasi dan mendata laporan dari para saksi. "Terkait dengan proses pemungutan suara, kami juga telah meminta agar DPP PDI Perjuangan Kota Yogyakarta terus konsisten dalam memperjuangkan dan mengawal suara rakyat," katanya.

Menurutnya, ada perbedaan nyata dan kejanggalan pada data yang diunggah KPU di internet. "Kita akan lihat itu, termasuk cari jawaban mengapa suara tidak sah jumlahnya sampai belasan ribu terjadi. Semua perlu dibuka saat pleno nanti," ujar Aris.

Ada Syaratnya

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budianto, mengatakan pihaknya telah melakukan pemungutan suara sebaik-baiknya. Menurut Wawan, tidak ada catatan terkait kesalahan yang dilakukan penyelenggara di seluruh TPS. "Di situ juga ada Panwas dan saksi. Mungkin saja pemilu ulang, kalau memenuhi persyaratan," katanya kepada Bernas di Yogyakarta, Minggu (19/2).

Wawan menegaskan, pihaknya tidak menutup diri dari pemilu ulang sepanjang memenuhi syarat-syarat terkait hal itu. Namun, Wawan juga menyatakan dari awal pemungutan suara sampai saat ini tidak memperoleh laporan terkait pelanggaran dari penyelenggara. "Panwas juga tidak memberi catatan terkait hal-hal itu," ujarnya.

Terkait pembukaan kotak suara tidak sah, kata Wawan, di beberapa kesempatan pihaknya tidak melarang. "Kita lakukan itu jika memang sesuai ketentuan peraturan dan untuk mencocokkan data yang sudah ada. Semuanya kan ada prosedurnya," ujarnya. (m3)

-KPU Kota Yk
-Panwas Kota Yk
B Nerd
B Nerd
B Untuk
Nikmatul

Tindak Lanjut

☐ Untuk Ditanggapi
☐ Untuk Diketahui
☐ Jumpa Pers

cpala
taris
d
S.Sos. MM
199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005